

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2022**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK

Jl. T. NYAK ARIEF NO. 130 BANDA ACEH, Telp/Fax. 0651-7551641 KODE POS 23115

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH

NOMOR: 065 / 389 / SK / 2021

TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika dan statistik;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45855);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
11. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 37 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penetapan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2022;
- KEDUA** : Pemberlakuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 dipakai sebagai Acuan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH

PADA TANGGAL : Agustus 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**


FADHIL, S.Sos.,MM
Pemimpin Utama Muda /
NIP. 19680919 199011 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga dapat menunaikan perintah-Nya serta diberikan kesempatan sebagai abdi negara untuk melayani masyarakat. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia.

Alhamdulillah Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan. Renja Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh. Dokumen Renja ini disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategik dan merupakan dokumen perencanaan yang konsisten di dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang terarah dan terpadu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang tersedia.

Dokumen Renja Tahun 2022 ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah, sehingga dalam penyelenggaraan jasa informasi dan telekomunikasi yang terpadu dan sinergis dengan sektor lainnya. Renja Tahun 2022 juga memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Diskominfotik Kota Banda Aceh untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis yang terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan.

Akhirnya Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2022 ini diharapkan bisa bermanfaat bagi berbagai pihak yang menggunakan, baik Pemerintah Kota, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh maupun masyarakat pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DISKOMINFOTIK TAHUN 2020	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Diskominfotik Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis Diskominfotik	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfotik.....	24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfotik	28
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFOTIK	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Kerja Diskominfotik	42
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISKOMINFOTIK ...	55
BAB V PENUTUP	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan tahunan pada level Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah yang diperlukan untuk mencapai target dan tujuan pembangunan. Rencana Kerja disusun melalui proses penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran dan dilengkapi dengan kerangka anggaran dan regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

Perumusan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh sendiri merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Rencana kerja Perangkat Daerah (RKPD) menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah. Dokumen Renja sendiri digunakan untuk mempertajam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif Diskominfo berdasarkan ketetapan di dalam Perkada tentang RKPD. Dokumen Renja sendiri kemudian diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh untuk kemudian dilakukan verifikasi dan dijadikan sebagai pedoman Diskominfo di dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Untuk periode tahun 2022 Renja memuat program, kegiatan dan sub kegiatan perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek peningkatan pendapatan perekonomian masyarakat maupun peningkatan indeks intelektual manusia. Penyusunan Renja Diskominfo tahun 2022 berpedoman pada

Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), hasil evaluasi Renja Diskominfo pada tahun lalu dan hasil evaluasi renja tahun berjalan.

Rencana Kerja Diskominfo Kota Banda Aceh tahun 2022 tentunya telah sesuai dengan rencana kerja kementerian dan pemerintah provinsi, dimana arah kebijakan pembangunan telah disinkronkan untuk mencapai indikator dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pada tahun 2022 di sektor komunikasi, informatika dan statistik serta hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

Prinsip Penyusunan Renja Diskominfo adalah :

1. Substansi Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang disesuaikan dengan Perkada RKPD;
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan serta memuat tolak ukur kinerja keluaran, target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan, target keluaran dan total dana yang diperlukan;
3. Berpedoman pada Renstra Diskominfo dimana hal ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang telah disusun;
4. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Diskominfo tahun lalu dan Renja Diskominfo tahun berjalan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang disusun dalam Renja Diskominfo dapat dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Diskominfo Kota Banda Aceh.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam Penyusunan Renja Diskominfo Kota Banda Aceh tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh 2017 – 2022;
18. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029;
19. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2022 dimaksudkan untuk menjabarkan rencana pembangunan Diskominfo Kota Banda Aceh tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, pagu indikatif serta prakiraan maju berdasarkan Review Rencana Strategis Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2022 adalah:

1. Mempertajam keterpaduan dan sinergi program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Diskominfo Kota Banda Aceh berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang RKPD, dan
2. Sebagai acuan bagi pemangku peran (*stakeholder*) Diskominfo Kota Banda Aceh untuk memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN STATISTIK (DISKOMINFOTIK) TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Diskominfo Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis Diskominfo.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Terdapat dua puluh enam kegiatan pada delapan program yang belum memenuhi target Renja dan Renstra Diskominfo yaitu :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik (48,3 %)
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (50,0%)
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor (54,2%)
 - Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman (41,1 %)
 - Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah (40%)
 - Pelayanan jasa pelelangan / pengadaan barang (20%)
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (0%)
 - Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (0%)
 - Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (28 %)
 - Kegiatan Pengadaan Mebeleur (0%)
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (0%)
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (57,9 %)
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (0 %)
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (29,4 %)

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer (0 %)
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi (0%)
 - Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (49,7 %)
- Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
 - Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (50 %)
 - Kegiatan Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah (40 %)
- Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa
 - Kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi (40%)
 - Kegiatan Pengadaan alat studio dan komunikasi (0%)
 - Kegiatan Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi (40 %)
- Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
 - Kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi (25 %)
- Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
 - Kegiatan Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi (20 %)
- Program Kerjasama Informasi dan Media Masa
 - Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (43,3%)
 - Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat (43,3%)

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Ada lima kegiatan pada tiga program yang telah memenuhi target Renja dan Renstra Diskominfo yaitu :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (60%)
 - Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (60%)
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran (60%)
 - Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa
 - Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi (60 %)
 - Program Kerjasama Informasi dan Media Masa
 - Kegiatan Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah (60 %)
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Ada satu kegiatan pada satu program yang telah melebihi target Renja Diskominfo yaitu :
- Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi (125 %)

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Faktor penyebab belum tercapainya target pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dikarenakan Diskominfo belum memiliki gedung sendiri dan merupakan bagian dari gedung Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sehingga pemeliharaan peralatan gedung kantor tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal. Selain itu pada program Peningkatan Disiplin Aparatur capaian target belum maksimal dikarenakan oleh beberapa hal seperti jumlah anggaran yang dialokasikan tidak

sesuai dengan kebutuhan pengadaan baju dinas, adanya kenaikan indeks harga satuan penyediaan baju dinas dan juga karena tidak tersedianya rekanan yang sesuai dengan kebutuhan pengadaan baju dinas serta pengalihan anggaran pada kegiatan yang lebih strategis. Untuk Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa, Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi, Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi dan Program Program Kerjasama Informasi dan Media Masa belum mencapai target dikarenakan adanya pengalihan anggaran ke beberapa program dan kegiatan yang lebih mendesak atau prioritas serta adanya kegiatan *refocusing* anggaran dikarenakan terjadinya peristiwa pandemi Covid-19.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Secara keseluruhan keterkaitan yang timbul dengan pencapaian target capaian program Renstra yang belum sesuai adalah belum maksimalnya performa dan kinerja dari Diskominfo di dalam memenuhi target dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah ditetapkan. Hal ini sangat dipengaruhi dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya di atas. Belum adanya gedung kantor mandiri Diskominfo menyebabkan pencapaian target program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Peningkatan Disiplin Aparatur masih belum maksimal. Implikasi dari masalah ini adalah menargetkan pada tahun 2022 pengelolaan Gedung Eks DPRK sudah berada di bawah dan menjadi aset Diskominfo sehingga pemenuhan target dan tupoksi Diskominfo menjadi semakin maksimal. Selain itu pada beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target capaian program Renstra pada Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan membuat Diskominfo harus memberikan skala prioritas pada program, kegiatan dan

sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang. Pandemi COVID-19 memberikan dampak pada pembatasan kegiatan lapangan sehingga membuat pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan secara daring atau *online* semakin meningkat. Hal ini membuat Diskominfo harus menyesuaikan rencana dan strategi di dalam pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan, seperti memperkuat kemampuan diseminasi informasi secara digital melalui media daring, memperkuat layanan internet dan interkoneksi yang disediakan dan lain-lain.

6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor tidak terserapnya anggaran pada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disebut di atas adalah dengan membakukan pengelolaan Gedung Madani Center yang saat ini berbagi pakai dengan Dinas Perhubungan untuk dikelola sepenuhnya oleh Diskominfo Kota Banda Aceh atau dengan mempercepat pembangunan dan pemeliharaan Gedung Eks DPRK yang akan dijadikan gedung baru Diskominfo, melakukan modifikasi strategi serta prioritasasi pada target beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkena *refocusing* anggaran dikarenakan peristiwa pandemi COVID-19.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Diskominfo Kota Banda Aceh sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.1.a.

Tabel 2.1.a
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun 2020
Kota Banda Aceh
Nama SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program (outcomes) / Keluaran Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2017-2022 (akhir periode renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2020 (tahun lalu/n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2020		Ket
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)*100	11
1	Urusan Wajib									
1	Komunikasi dan Informasi									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	80,6	-	48,2	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik	Jumlah waktu jasa komunikasi, SDA, dan Listrik yang disediakan	60 bln	17	12	12	100,0	29 bln	48,3	
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu jasa kebersihan kantor yang disediakan	60 bln	18	12	12	100,0	30 bln	50,0	

1	25	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	190	jenis	70	33	33	100,0	103	jenis	54,2	
1	25	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang disediakan	35	jenis	13	8	8	100,0	21	jenis	60,0	
1	25	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	30	jenis	12	6	6	100,0	18	jenis	60,0	
1	25	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	24200	porsi	7040	2904	2904	100,0	9944	porsi	41,1	
1	25	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	100	lap	35	20	5	25,0	40	lap	40	
1	25	01	19	Pelayanan jasa pelelangan / pengadaan barang	Jumlah waktu jasa pelelangan/pengadaan barang yang disediakan	30	bln	6	0	0	0,0	6	bln	20	
1	25	01	20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran	Jumlah waktu jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang disediakan	60	bln	24	12	12	100,0	36	bln	60,0	
1	25	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	22,2	-	-	12,8	
1	25	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	7	unit		0	0	0,0	0	unit	0,0	

1	25	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan	3	jenis		0	0	0,0	0	jenis	0,0	
1	25	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	50	jenis	14	6	0	0,0	14	jenis	28,0	
1	25	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah jenis mebeleur yang disediakan	10	jenis		0	0	0,0	0	jenis	0,0	
1	25	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	3	kali		0	0	0,0	0	kali	0,0	
1	25	02	24	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional yang dilaksanakan	240	kali	91	48	48	100,0	139	kali	57,9	
1	25	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor yang dilaksanakan	60	kali		0	0	0,0	0	kali	0,0	
1	25	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilaksanakan	252	kali	54	20	20	100,0	74	kali	29,4	
1	25	02	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer	Jumlah pemeliharaan mebeluer yang dilaksanakan	60	kali		0	0	0,0	0	kali	0,0	
1	25	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	50,0			24,9	
1	25	03	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin absensi elektronik yang di sediakan	1	unit		0	-	0,0	0	unit	0,0	

1	25	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	183	stel	31	60	60	100,0	91	stel	49,7	
1	23	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	<i>Persentase terpenuhinya data base statistik daerah</i>	100%	100%	100%	100%	50,0	45,0				
1	23	15	01	Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Jumlah dokumen data dan statistik daerah yang tersusun	4	dok	1	1	1	100,0	2	dok	50	
1	23	15	02	Kegiatan Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Jumlah dokumen data statistik yang diolah, diupdate dan dianalisis	5	dok	2	1	0	0,0	2	dok	40	
1	25	15		Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa	<i>Persentase terwujudnya sistem pemerintah yang berbasis TIK dan masyarakat dapat melayani secara elektronik</i>	100%	100%	100%	100%	60,0	53,0				
1	25	15	02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah pembinaan warnet yang dilaksanakan	210	kali	84	42	0	0,0	84	kali	40	
1	25	15	03	Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah sumber daya komunikasi dan informasi yang dibina dan dikembangkan	60	org	45	30	30	100,0	75	org	125	
1	25	15	05	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Jumlah alat studio dan komunikasi yang disediakan	4	unit	0	0	0	0,0	0	unit	0	
1	25	15	06	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah sarana dan prasarana informatika yang tersedia	40	unit	16	8	8	100,0	24	unit	60	

1	25	15	07	Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi	Jumlah kegiatan Perencanaan komunikasi dan informatika yang dilakukan	5	1	1	1	1	100,0	2	40
1	25	15		<i>Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi</i>	<i>Persentase terpenuhinya data base infokom</i>	0%	0%	20%	20%	0,0	25,0	-	
1	25	16	01	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Jumlah kegiatan penelitian penyusunan data base informasi dan komunikasi yang dilakukan	4	1	1	0	0,0	25	1	
1	25	17		<i>Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</i>	<i>Persentase terpenuhinya peningkatan SDM bidang Kominfo</i>	20%	20%	20%	20%	0,0	20,0	-	
1	25	17	01	Kegiatan Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah SDM yang telah dilatih dalam bidang Komunikasi dan Informasi	150	30	30	0	0,0	20	30	
1	25	18		<i>Program Kerjasama Informasi dan Media Masa</i>	<i>Persentase terserapnya informasi pelaksanaan pemerintahan kepada masyarakat</i>	20%	20%	20%	20%	100,0	48,9	-	
1	25	18	01	Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan informasi pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat	25	10	5	5	100,0	60	15	

1	25	18	02	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembinaan terhadap kelompok informasi gampong yang dilaksanakan	30	kali	12	1	1	100,0	13	kali	43,3	
1	25	18	03	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	Jumlah penyuluhan KIG yang dilaksanakan	30	kali	12	1	1	100,0	13	kali	43,3	

Sementara itu, dikarenakan oleh terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat perubahan nomor rekening dan penambahan sub kegiatan pada Rencana Kerja dan Rencana Strategis Diskominfo serta perkiraan realisasi capaian target tahun 2021 adalah 100% terhadap tahun tersebut atau 50% terhadap 2 tahun target dalam renstra penyesuaian (2021-2022). Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Diskominfo Kota Banda Aceh dan pencapaian renstra Diskominfo Kota Banda Aceh sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1.b.

Tabel 2.1.1.b
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun 2021
Kota Banda Aceh
Nama SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

Kode			Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021- 2022 (akhir periode renstra SKPD)	Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)			Ket
							Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
1			2	3	4	5	6	7=(6/4)x100		11
2			Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Terkait Pelayanan Dasar							
2	16		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika							
2	16	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	50,5	
2	16	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun	100%	100%	100%	100%	50,0	
2	16	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	10	dok	5	dok	50,0	
2	16	01	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	50,0	

2	16	01	2.02	01	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	24	bln	12	bln	12	bln	50,0	
2	16	01	2.02	02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan	24	bln	12	bln	12	bln	50,0	
2	16	01	2.05	01		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	48,8	
2	16	01	2.05	02	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan-nya yang disediakan	80	stel	39	stel	39	stel	48,8	
2	16	01	2.06	01		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50,0	
2	16	01	2.06	01	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	jenis	6	jenis	6	jenis	50,0	
2	16	01	2.06	05	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	14	jenis	7	jenis	7	jenis	50,0	
2	16	01	2.06	09	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	40	laporan	20	laporan	20	laporan	50,0	
2	16	01	2.07			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	55,0	
2	16	01	2.07	02	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	5	unit	3	unit	3	unit	60,0	

2	16	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	20	unit	10	unit	10	unit	50,0
2	16	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50,0
2	16	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	24	bln	12	bln	12	bln	50,0
2	16	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24	bln	12	bln	12	bln	50,0
2	16	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50,0
2	16	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8	unit	4	unit	4	unit	50,0
2	16	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	116	unit	58	unit	58	unit	50,0
2	16	02			Program Informasi & Komunikasi Publik	Persentase Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50,0
2	16	02	2.01		Kegiatan Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50,0
2	16	02	2.01	02	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Aspirasi atau Pengaduan Warga yang Direspon	24	Laporan	12	Aspirasi	12	Aspirasi	50,0

2	16	02	2.01	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Rilis Berita, Informasi dan Liputan yang dipublikasi	1200	Berita	600	Berita	600	Berita	50,0	
2	16	02	2.01	06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Direspon dan Diverifikasi	24	Laporan	12	Permohonan	12	Permohonan	50,0	
2	16	02	2.01	07	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Media Massa dan Media Luar Ruang yang Digunakan Untuk Mendesiminasikan Informasi	10	Media	5	Media	5	Media	50,0	
2	16	02	2.01	08	Sub Kegiatan Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Internet Syariah di Fasilitas Publik Kota Banda Aceh	20	Laporan	10	kali	10	kali	50,0	
2	16	02	2.01	10	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SDM OPD yang diberikan Pelatihan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	90	Orang	45	Orang	45	Orang	50,0	
2	16	02	2.01	12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Pembinaan Kelompok Informasi Gampong yang Dilaksanakan	2	Kali	1	Kali	1	Kali	50,0	
2	16	03			Program Aplikasi Informatika	Persentase terpenuhinya layanan, jaring komunikasi dan layanan serta data terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	45,8	
2	16	03	2.01		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota	Persentase domain jaring komunikasi yang dikelola	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50,0	
2	16	03	2.01	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD yang Diberikan Layanan Jaringan Intra (WAN) Pemerintah	88	SKPD	44	SKPD	44	SKPD	50,0	
2	16	03	2.02		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota	persentase layanan e-government yang dikelola	100%	100%	100%	100%	100%	100%	41,7	

2	16	03	2.02	01	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota	Jumlah SDM Pemda yang Dilatih Untuk Pembuatan Dokumen Proses Bisnis SKPK	94	Orang	47	Orang	47	Orang	50,0
2	16	03	2.02	03	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Jangka Waktu Pelayanan Operasional Pusat Data	2	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	50,0
2	16	03	2.02	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE Kota	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	50,0
2	16	03	2.02	07	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Khusus yang Dikembangkan	6	Aplikasi	3	Aplikasi	3	Aplikasi	50,0
2	16	03	2.02	09	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Jenis Penguatan Command Center Kota yang Dilaksanakan	4	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	50,0
2	16	03	2.02	12	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Laporan Monev SPBE	1	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	0,0
2	20				Urusan Pemerintahan Bidang Statistik								
2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya data base statistik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50,0
2	20	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50,0
2	20	02	2.01	02	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Pemda yang Memiliki Kapasitas Mutu Integrasi Statistik Daerah	136	Orang	68	Orang	68	Orang	50,0
2	20	02	2.01	04	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang diverifikasi/validasi, diupdate dan dianalisis open/public datasetnya	68	OPD	34	OPD	34	OPD	50,0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo

Capaian kinerja pelayanan Diskominfo Kota Banda Aceh dapat dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Diskominfo yang telah tertuang dalam Renstra Diskominfo, yaitu penyelenggaraan komunikasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja komunikasi dan statistik, dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik yang prima di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Untuk mendukung capaian tersebut Diskominfo Kota Banda Aceh merujuk pada beberapa indikator tingkat kinerja pelayanan yang harus diraih. Pertama, terkait dengan Persentase data Statistik Sektor Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu ditahun 2022 ditargetkan mencapai 25%, dimana pada tahun 2020 mencapai 15%. Persentase website OPD yang aktif dalam menginformasikan pembangunan daerah di SKPD-nya ditahun 2022 ditargetkan mencapai 80%, dimana pada tahun 2020 mencapai 70%. Terkait dengan Persentase permintaan informasi publik yang dapat dilayani ditahun 2022 ditargetkan mencapai 97%, dimana pada tahun 2020 mencapai 94%. Begitu juga dengan Persentase aspirasi masyarakat melalui aplikasi suwarga yang dapat ditindaklanjuti ditahun 2022 mencapai 97%, dimana indikator tersebut mencapai 94% di tahun 2020. Untuk Nilai Peningkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik ditahun 2022 ditargetkan mencapai 3 (B), sedangkan keadaannya ditahun 2020 mencapai 2,87 (CC). Untuk Persentase OPD yang aplikasinya terintegrasi ditahun 2022 ditargetkan mencapai 25%, ditahun 2020 mencapai 15% dari total jumlah OPD. Untuk Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan pada tahun 2022 ditargetkan mencapai 100%, hal tersebut sama dengan capaian di tahun 2020 yang juga 100%.

Demikian juga untuk Cakupan Layanan Telekomunikasi ditahun 2022 ditargetkan mencapai 0,90%, dimana ditahun 2020 indikator tersebut mencapai 0,86%. Untuk Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon ditahun 2022 ditargetkan mencapai 90%, sedangkan ditahun 2020 mencapai 86%. Untuk Proporsi rumah tangga

dengan akses internet ditahun 2022 ditargetkan mencapai 0,90%, sedangkan di tahun 2020 mencapai 0,86%. Indikator terakhir adalah Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi ditahun 2022 ditargetkan mencapai 0,50%, sementara ditahun 2020 hanya mencapai 0,46%.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfo dapat dilihat lebih detail pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfofik Kota Banda Aceh

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA DISKOMINFOTIK			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
				2020	2021	2022	2020	2021		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	2022	13
1	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu		25%	15%	20%	25%	15%	20%	25%	Tercapai
2	Persentase website OPD yang aktif		80%	70%	75%	80%	70%	75%	80%	Tercapai
3	Persentase permintaan informasi publik yang dapat dilayani		97%	94%	95%	97%	94%	95%	97%	Tercapai
4	Persentase aspirasi masyarakat melalui aplikasi suwarga yang dpt ditindaklanjuti		97%	94%	95%	97%	94%	95%	97%	Tercapai
5	Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik		3 (B)	2,8 (CC)	2,9 (CC)	3 (B)	2,87 (CC)	2,9 (CC)	3 (B)	Tercapai
6	Persentase OPD yang aplikasinya terintegrasi		25%	15%	20%	25%	15%	20%	25%	Tercapai

7	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
8	Cakupan Layanan Telekomunikasi		0,90	0,86	0,88	0,90	0,86	0,88	0,90	0,88	0,90	Tercapai
9	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telpon		90%	86%	88%	90%	86%	88%	90%	88%	90%	Tercapai
10	Proporsi rumah tangga dengan akses internet		0,90	0,86	0,88	0,90	0,86	0,88	0,90	0,88	0,90	Tercapai
11	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi		0,50	0,46	0,48	0,50	0,46	0,48	0,50	0,48	0,50	Tercapai

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfo

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang komunikasi pada Pemerintah Kota Banda Aceh, Diskominfo Kota Banda Aceh telah menyusun program kerja, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis dimana memuat tugas pokok dan fungsi dan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Banda Aceh yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022. Dalam RPJMD tersebut, Diskominfo mendukung pencapaian misi Walikota dan Wakil Walikota yakni “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik”, dengan tujuan “Tersedianya data dan informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh.”

Dalam mendukung capaian misi tersebut Diskominfo Kota Banda Aceh merujuk pada beberapa indikator tingkat kinerja pelayanan yang harus diraih. Dari 11 indikator pencapaian kinerja Diskominfo seperti yang bisa dilihat pada Tabel 2.2, realisasi capaian 11 indikator tersebut pada tahun 2020 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh tercapai dan terlaksananya indikator yang pada tahun-tahun sebelumnya tidak terpenuhi sehingga menjadi faktor penyebab tidak tercapainya target indikator kinerja tersebut, terutama pada indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang pada tahun-tahun sebelumnya tidak tercapai seperti tidak adanya dokumen *masterplan/blueprint/arsitektur* Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kota Banda Aceh dan minimnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada aplikasi yang digunakan oleh lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimana hal ini tidak hanya terjadi pada Diskominfo Kota Banda Aceh, namun hampir keseluruhan SKPD di lingkungan Kota Banda Aceh. Diskominfo sendiri sepenuhnya menjalankan rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Penilai SPBE dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sembari meningkatkan koordinasi dan elaborasi dengan semua

Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kota (SKPK/SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Untuk mencapai target indikator sebagaimana disebutkan sebelumnya ada beberapa permasalahan dan hambatan yang mungkin timbul diantaranya yaitu :

1. Keterbatasan anggaran;
2. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana TIK.

Permasalahan di atas tentunya akan berdampak pada terhambatnya pencapaian visi dan misi Walikota Banda Aceh terhadap kontribusinya pada capaian program nasional seperti RPJMN, SPM dan SDGs. Khusus untuk SDGs, dari 17 tujuan (*goals*) yang ingin dicapai, dari ketiga permasalahan dan hambatan diatas diperkirakan akan berdampak pada tujuan ke-7, ke-9, dan tujuan ke-11.

Untuk meningkatkan pelayanan komunikasi, informasi dan statistik sebagai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Diskominfo Kota Banda Aceh ada beberapa tantangan serta peluang yang harus dihadapi yaitu :

1. Tantangan

- Belum konsistensinya penerapan regulasi serta terbitnya regulasi baru terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Belum adanya evaluasi rencana induk pengembangan TIK;
- Belum adanya perencanaan bidang komunikasi, informatika dan statistik yang berkualitas dan konsisten;
- Belum maksimalnya penggarapan kekayaan potensi bidang komunikasi, informatika dan statistik.

2. Peluang

- Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- Semakin pesatnya kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Semakin memadainya pengadaan sarana dan prasarana infrastruktur TIK Kota Banda Aceh.

Berdasarkan tupoksi pelayanannya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dihadapkan pada beberapa isu penting, yaitu:

1. Masih rendahnya pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan pentingnya data statistik sektoral untuk menunjang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan;
2. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di bidang Berita (Korespondensi) dan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK);
3. Belum representatifnya serta terpadu/terintegrasinya sarana dan prasarana TIK yang dimiliki oleh Diskominfo; dan
4. Masih rendahnya pemahaman Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Formulasi di dalam menyikapi isu-isu di atas, Diskominfo Kota Banda Aceh akan menempuh beberapa strategi diantaranya yaitu meningkatkan jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis (bimtek)/pendidikan dan latihan (diklat), penyediaan fasilitas penunjang untuk diseminasi informasi, membangun serta mengadakan sarana dan prasarana TIK yang representatif dan terintegrasi, serta melakukan koordinasi/kerjasama dengan berbagai *stakeholder* ditingkat pusat dan provinsi terkait penerapan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Banda Aceh.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal (Ranwal) RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah dengan menyesuaikan antara program pembangunan dari Pemerintah Kota dengan analisis gambaran umum kondisi daerah serta kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program, kegiatan

dan sub kegiatan prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan kota.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Diskominfo Kota Banda Aceh perlu dilakukan sinkronisasi dengan Ranwal RKPD. Setelah dilakukan sinkronisasi dengan Ranwal RKPD terdapat beberapa penyesuaian pada Renja. Untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tidak ada perubahan dikarenakan oleh Ranwal RKPD sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana ada perubahan kode rekening dan penambahan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Diskominfo pada Tahun Anggaran 2022. Namun ada satu sub kegiatan pada Renja yang tidak dilakukan pada Tahun 2022 yaitu Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE dikarenakan Diskominfo tidak melakukan pengajuan anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan ini pada Tahun 2022.

Kebutuhan Dana pada Renja Diskominfo Tahun 2022 juga berbeda dengan Pagu Indikatif yang ada pada Ranwal RKPD dimana hal ini disebabkan oleh adanya perubahan anggaran yang diajukan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan prioritas dan memaksimalkan pencapaian target kinerja Diskominfo. Salah satu alasan utama peningkatan pagu anggaran ini adalah adanya pembangunan Gedung kantor baru Diskominfo sehingga membutuhkan banyak dana dan anggaran. Penambahan tim teknis dan tenaga Non-PNS Ahli untuk meningkatkan performa Diskominfo juga memperbesar kebutuhan dana yang diperlukan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 bisa dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022

Kota Banda Aceh

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokas i	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokas i	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Syiah Kuala	Persentase pemuenuhan kebutuhan perangkat daerah	100 %	7.375.263.914	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Syiah Kuala	Persentase pemuenuhan kebutuhan perangkat daerah	100%	7.905.346.615	
2	Perencanaan, dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Syiah Kuala	Persentase Pemuenuhan Administrasi Perkantoran	100 %	5.250.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Syiah Kuala	Persentase Pemuenuhan Administrasi Perkantoran	100 %	45.000.000	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Syiah Kuala	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	5 Doku men	5.250.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Syiah Kuala	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	5 Doku men	45.000.000	Adanya Kegiatan Forum OPD
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Syiah Kuala	Persentase Pemuenuhan Administrasi Perkantoran	100 %	6.556.515.767	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Syiah Kuala	Persentase Administrasi Keuangan	100 %	5.702.080.365	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Syiah Kuala	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	12 bln	5.810.197.360	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Syiah Kuala	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	12 bln	3.702.820.365	Jumlah ASN Bertambah dan penyesuaian tunjangan serta gaji

6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Syiah Kuala	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan	12	bln	746.318.407	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Syiah Kuala	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan	12	bln	1.999.260.000	Penambahan Tenaga Non-PNS
7	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Syiah Kuala	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100	%	15.825.892	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Syiah Kuala	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100	%	80.300.000	
8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Syiah Kuala	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	41	Stel	15.825.892	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Syiah Kuala	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	146	Stel	80.300.000	Jumlah ASN Bertambah
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Syiah Kuala	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100	%	128.904.438	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Syiah Kuala	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100	%	127.189.150	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Syiah Kuala	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6	jenis	6.381.408	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Syiah Kuala	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6	jenis	8.384.000	Memenuhi Kebutuhan Kantor Baru
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Syiah Kuala	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	7	jenis	20.420.505	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Syiah Kuala	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	7	jenis	22.153.000	Memenuhi Kebutuhan Dokumen Kantor yang Meningkat
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Syiah Kuala	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	20	laporan	102.102.525	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Syiah Kuala	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	20	laporan	96.652.150	Pembatasan Perjalanan Dinas Luar Daerah
13	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Syiah Kuala	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100	%	352.501.212	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Syiah Kuala	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100	%	1.239.207.000	

14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Syah Kuala	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2	unit	275.625.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Syah Kuala	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1	unit	250.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Syah Kuala	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10	unit	76.876.212	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Syah Kuala	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10	unit	989.207.000	Pengalihan Belanja Modal Bidang
16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Syah Kuala	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100	%	220.029.847	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Syah Kuala	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100	%	508.902.500	
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Syah Kuala	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	12	bln	93.139.382	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Syah Kuala	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	12	bln	451.364.000	Memenuhi Kebutuhan Kantor Baru
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Syah Kuala	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	bln	126.890.465	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Syah Kuala	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	bln	57.538.500	Memenuhi Kebutuhan Kantor Baru
19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Syah Kuala	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100	%	96.236.759	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Syah Kuala	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100	%	202.667.600	
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Syah Kuala	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	unit	71.926.634	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Syah Kuala	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	unit	109.392.100	Memenuhi Kebutuhan Kantor Baru
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Syah Kuala	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	58	unit	24.310.125	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Syah Kuala	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	58	unit	93.275.500	Memenuhi Kebutuhan Kantor Baru

22	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Syiah Kuala	Persentase Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada Masyarakat	100	%	2.303.944.346	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Syiah Kuala	Persentase Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada Masyarakat	100	%	1.720.397.150	
23	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Syiah Kuala	Persentase Website OPD yang Aktif	80	%	2.303.944.346	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Syiah Kuala	Persentase Website OPD yang Aktif	80	%	1.720.397.150	
24	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Syiah Kuala	Jumlah Aspirasi atau Pengaduan Warga yang Direspon	12	Aspirasi	83.869.931	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Syiah Kuala	Jumlah Aspirasi atau Pengaduan Warga yang Direspon	12	Aspirasi	116.162.000	Penambahan Tim Teknis
25	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Syiah Kuala	Jumlah Rilis Berita, Informasi dan Liputan yang dipublikasi	600	Berita	7.057.838	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Syiah Kuala	Jumlah Rilis Berita, Informasi dan Liputan yang dipublikasi	600	Berita	218.891.500	Penambahan Tim Teknis
26	Pelayanan Informasi Publik	Syiah Kuala	Pernohonan Informasi Publik yang Direspon dan Diverifikasi	12	Pernohonan	1.778.569.205	Pelayanan Informasi Publik	Syiah Kuala	Jumlah Pernohonan Informasi Publik yang Direspon dan Diverifikasi	12	Pernohonan	392.718.900	Penambahan Tim Teknis
27	Layanan Hubungan Media	Syiah Kuala	Jumlah Media Massa dan Media Luar Ruang yang Digunakan Untuk Mendesiminasikan Informasi	5	Media	41.772.696	Layanan Hubungan Media	Syiah Kuala	Jumlah Media Massa dan Media Luar Ruang yang Digunakan Untuk Mendesiminasikan Informasi	5	Media	906.622.850	Penyisipan POKIR, Penambahan Item Sub Kegiatan
28	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Syiah Kuala	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Internet Syaria di Fasilitas Publik Kota Banda Aceh	10	kali	270.154.244	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Syiah Kuala	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Internet Syaria di Fasilitas Publik Kota Banda Aceh	10	kali	20.264.900	Pembatasan Kegiatan Lapangan
29	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Syiah Kuala	Jumlah SDM OPD yang diberikan Pelatihan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	45	Orang	116.520.432	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Syiah Kuala	Jumlah SDM OPD yang diberikan Pelatihan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	45	Orang	16.768.000	Pembatasan Kegiatan Kerumunan

30	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Syah Kuala	Jumlah Pembinaan Kelompok Informasi Gampong yang Dilaksanakan	1	Kali	6.000.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Syah Kuala	Jumlah Pembinaan Kelompok Informasi Gampong yang Dilaksanakan	1	Kali	48.969.000	Penambahan peserta Lomba
31	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Syah Kuala	Persentase terpenuhinya layanan jaring komunikasi dan layanan serta data terintegrasi	100	%	1.342.929.536	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Syah Kuala	Persentase terpenuhinya layanan jaring komunikasi dan layanan serta data terintegrasi	100	%	10.438.499.980	
32	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota	Syah Kuala	Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan	55	%	21.000.000	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota	Syah Kuala	Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan	55	%	4.703.963.280	
33	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Syah Kuala	Jumlah SKPD yang Diberikan Layanan Jaringan Intra (WAN) Pemerintah	44	SKPD	21.000.000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Syah Kuala	Jumlah SKPD yang Diberikan Layanan Jaringan Intra (WAN) Pemerintah	44	SKPD	4.703.963.280	Penyisipan Dana OTSUS
34	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Syah Kuala	Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan	55	%	1.321.929.536	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Syah Kuala	Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan	55	%	5.734.536.700	
35	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota	Syah Kuala	Jumlah SDM Pemda yang Dilatih Untuk Pembuatan Dokumen Proses Bisnis SKPK	47	Orang	42.265.328	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota	Syah Kuala	Jumlah SDM Pemda yang Dilatih Untuk Pembuatan Dokumen Proses Bisnis SKPK	47	Orang	254.047.750	Pembuatan Dokumen Proses Bisnis
36	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Syah Kuala	Jumlah Jangka Waktu Pelayanan Operasional Pusat Data	1	Tahun	41.980.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Syah Kuala	Jumlah Jangka Waktu Pelayanan Operasional Pusat Data	1	Tahun	278.332.000	Persiapan Kantor baru

37	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Syiah Kuala	Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE Kota	1	Dokumen	6.077.531	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Syiah Kuala	Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE Kota	1	Dokumen	80.057.000	Penambahan Tim Teknis
38	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Syiah Kuala	Jumlah Aplikasi Khusus yang Dikembangkan	3	Aplikasi	1.142.069.994	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Syiah Kuala	Jumlah Aplikasi Khusus yang Dikembangkan	3	Aplikasi	293.956.600	Maksimalisasi Item dan Aplikasi
39	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Syiah Kuala	Jumlah Jenis Penguatan Command Center Kota yang Dilaksanakan	2	Jenis	40.603.184	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Syiah Kuala	Jumlah Jenis Penguatan Command Center Kota yang Dilaksanakan	2	Jenis	4.828.143.350	Penyisipan Dana OTSUS Pembangunan Gedung
40	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Syiah Kuala	Jumlah Laporan Monev SPBE	1	Laporan	48.933.499	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Syiah Kuala	Jumlah Laporan Monev SPBE	1	Laporan	-	
41	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Syiah Kuala	Persentase terpenuhinya data base statistik daerah	100	%	547.204.835	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Syiah Kuala	Persentase terpenuhinya data base statistik daerah	100	%	229.150.650	
42	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Syiah Kuala	Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu	25	%	547.204.835	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Syiah Kuala	Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu	25	%	229.150.650	
43	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Syiah Kuala	Jumlah SDM Pemda yang Memiliki Kapasitas Mutu Integrasi Statistik Daerah	68	Orang	470.863.969	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Syiah Kuala	Jumlah SDM Pemda yang Memiliki Kapasitas Mutu Integrasi Statistik Daerah	68	Orang	132.704.150	Maksimalisasi Item dan Anggaran

44	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Syiah Kuala	Jumlah OPD yang diverifikasi/validasi, diupdate dan dianalisis open/public datasetnya	34	OPD	76.340.866	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Syiah Kuala	Jumlah OPD yang diverifikasi/validasi, diupdate dan dianalisis open/public datasetnya	34	OPD	96.446.500	Maksimalisasi Item dan Anggaran
45	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Syiah Kuala	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100	%	35.335.125	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Syiah Kuala	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100	%	300.321.500	
46	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Syiah Kuala	Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan	55	%	24.310.125	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Syiah Kuala	Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan	55	%	281.004.500	
47	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Syiah Kuala	Jumlah Jangka Waktu Layanan Sistem Keamanan Jaringan yang Diadakan	1	Tahun	24.310.125	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Syiah Kuala	Jumlah Jangka Waktu Layanan Sistem Keamanan Jaringan yang Diadakan	1	Tahun	281.004.500	Penambahan Tim Teknis
48	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Syiah Kuala	Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan	55	%	11.025.000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Syiah Kuala	Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan	55	%	19.317.000	
49	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Syiah Kuala	Jumlah Surat Sandi yang Dikelola	200	Surat	11.025.000	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Syiah Kuala	Jumlah Surat Sandi yang Dikelola	200	Surat	19.317.000	Maksimalisasi Item dan Anggaran
TOTAL BELANJA						11.604.677.756							20.593.715.895

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui pelaksanaan program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang diterima oleh Diskominfo dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh akan diperoleh berbagai usulan aspirasi kebutuhan masyarakat Kota Banda Aceh yang akan disesuaikan dengan program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan Kota Banda Aceh pada Tahun 2022. Melalui program ini akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRK Banda Aceh.

Terdapat usulan masyarakat yang terangkum pada Pokir yang akan dilaksanakan oleh Diskominfo pada tahun 2022 terkait dengan Jumlah Media Massa dan Media Luar Ruang yang Digunakan Untuk Mendesiminasikan Informasi, dimana usulan ini masuk pada Program Informasi dan Komunikasi Publik pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota khususnya pada Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media. Usulan ini diperoleh melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dimana anggota DPRK Kota Banda Aceh akan memasukkan usulan berdasarkan pot-pot usulan yang sudah disediakan oleh Diskominfo. Pot-pot usulan ini harus sesuai dengan isu-isu penting dan juga tupoksi dari Diskominfo yang bergerak di dalam bidang Komunikasi, Informasi dan Statistik. Apabila usulan dewan (Pokir) sudah masuk ke dalam SIPD, Diskominfo kemudian akan memilih usulan mana yang sesuai dengan tupoksi dan isu-isu penting yang sedang dikerjakan oleh Diskominfo sehingga dapat diverifikasi dan divalidasi oleh Diskominfo Kota Banda Aceh.

Usulan Anggota DPRK atau Pokir yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh Diskominfo Kota Banda Aceh pada Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

TABEL 2.4.
USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022
KOTA BANDA ACEH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Kota Banda Aceh	Jumlah Media Massa dan Media Luar Ruang yang Digunakan Untuk Mendesiminasikan Informasi	- Pengadaan Space ballho khusus informasi publik diskominfotik sebanyak 1 Kegiatan sebesar Rp 150.000.000,-	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFOTIK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di dalam menunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Kota (Pemkot) Banda Aceh di bidang Teknologi, Informatika dan Komunikasi (TIK). Diskominfo juga mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh pada misi kelima yaitu “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik” dengan tujuan “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”.

Hal ini selaras dengan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh tahun 2017 - 2022 dengan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2017 – 2022 pada misi pertama yaitu “Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa”. Selain itu tupoksi Diskominfo juga selaras dengan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh tahun 2007 - 2027 Dengan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh tahun 2012 – 2022 pada misi kedua yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah disertai dengan penegakan hukum”

Pencapaian kinerja Diskominfo terlihat pada pencapaian indeks e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Banda Aceh yang harus sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sektor kementerian komunikasi dan informatika dimana nilai indeks e-government atau pemerintahan elektronik nasional dimulai dengan nilai 2,8 ditahun 2015, 2,9 ditahun 2016, 3,0 ditahun 2017, dan 3,2 ditahun 2018, serta 3,4 ditahun 2019.

Disamping itu Diskominfo juga terus meningkatkan jumlah pemberdayaan kelompok informasi masyarakat, dimana pada tahun 2015 berjumlah 10 kabupaten/kota serta ditahun 2019 sebanyak 30

kabupaten/kota. Jumlah pelayanan informasi publik melalui kemitraan dengan Perangkat Daerah tahun 2015 sebanyak 30 Perangkat Daerah dan sampai dengan tahun 2019 sebanyak 80 Perangkat Daerah.

Dari ketiga indikator nasional tersebut Dinas Kominfo Kota Banda Aceh terus berupaya untuk meningkatkan indeks pemerintahan elektronik (e-government) dari tahun ke tahun dan senantiasa terus berupaya untuk meningkatkan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat serta pelayanan informasi publik kepada masyarakat luas dan *stakeholder* yang membutuhkannya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Diskominfo

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan tahap penting di dalam penyusunan dokumen Renja, dimana tujuan dan sasaran merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banda Aceh melalui Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan Strategik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Dengan diformulasikan tujuan strategik ini maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Adapun yang menjadi tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh.

2. Sasaran

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas.

Adapun yang menjadi sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

- Tersedianya data statistik Sektorial yang berkualitas dan terintegrasi;
- Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan informasi publik.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi Perangkat Daerah dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari atau mengacu kepada program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Renja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sub Kegiatan merupakan bentuk dari implementasi atau aktivitas kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dan mengacu kepada program sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1. Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2022 yang akan dilaksanakan Diskominfo Kota Banda Aceh tentunya telah sesuai dan mendukung beberapa faktor seperti berikut :

- Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh yang tertuang dalam RPJMD;
- Mendukung tujuan SDGs, dari 17 tujuan (*goals*) yang ingin dicapai, terdapat 3 kesesuaian yakni tujuan ke-7 (*affordable and clean energy*), ke-9 (*industry, innovation and infrastructure*) dan tujuan ke-11 (*sustainable cities and communities*);
- Mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Diskominfo Kota Banda Aceh;
- Meningkatkan Indeks Pencapaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Banda Aceh;
- Mendukung Kota Banda Aceh sebagai salah satu kota dengan konsep pelayanan Smart City.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh periode 2017-2022 adalah “Mewujudkan Banda Aceh Gemilang dalam bingkai syariah.” Untuk mewujudkan visi tersebut ditopang oleh (7) tujuh misi yaitu :

- Meningkatkan pelaksanaan syariat islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan ahklak;
- Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat;
- Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik;
- Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
- Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Diskominfo Kota Banda Aceh merupakan Perangkat Daerah yang tergabung untuk mewujudkan misi ke-5 yakni meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang tentunya disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan harus ditopang oleh data yang berkualitas dan berkesinambungan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat di Diskominfo antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1.Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1.Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2.Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1.Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1.Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.4.2.Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.4.3.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1.Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.5.2.Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
 - 1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2. Program Informasi & Komunikasi Publik
 - 2.1. Kegiatan Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - 2.1.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - 2.1.3. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - 2.1.4. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media
 - 2.1.5. Sub Kegiatan Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
 - 2.1.6. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - 2.1.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- 3. Program Aplikasi Informatika
 - 3.1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota
 - 3.1.1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - 3.2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.2.1. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota
 - 3.2.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - 3.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
 - 3.2.4. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

- 3.2.5.Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
- 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - 4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota
 - 4.1.1.Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
 - 4.1.2.Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
- 5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - 5.1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1.1.Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - 5.2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.2.1.Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penyebaran lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfo untuk tahun 2022 lebih banyak dilakukan di Kecamatan Syiah Kuala dibandingkan dengan delapan kecamatan lainnya di Kota Banda Aceh, dengan total 5 program, 13 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Hal ini disebabkan karena mayoritas aktivitas program, kegiatan, sub kegiatan dilaksanakan di kantor Diskominfo yang berlokasi di Kecamatan Syiah Kuala, dengan rencana total jumlah pagu indikatif 2022 mencapai Rp 20.585.446.035,-.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Diskominfo Kota Banda Aceh sedikit berbeda dengan Ranwal RKPD. Terdapat satu sub kegiatan pada Ranwal RKPD yang tidak masuk pada Renja Tahun 2022 yaitu Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE pada Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota khususnya pada Program Aplikasi dan Informatika.

Hal ini dikarenakan oleh Diskominfo tidak melakukan pengajuan Anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE pada Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ini pada Tahun 2022 dimana hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan prioritasasi dan memaksimalkan pencapaian target kinerja Diskominfo. Kebutuhan Dana pada Rancangan Renja juga berbeda dengan Pagu Indikatif yang ada pada Ranwal RKPD dimana hal ini disebabkan oleh adanya perubahan anggaran yang diajukan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan prioritasasi dan memaksimalkan pencapaian target kinerja Diskominfo. Salah satu alasan utama peningkatan pagu anggaran ini adalah adanya pembangunan Gedung kantor baru Diskominfo sehingga membutuhkan banyak dana dan anggaran. Penambahan tim teknis dan tenaga Non-PNS Ahli untuk meningkatkan performa Diskominfo juga memperbesar kebutuhan dana yang diperlukan.

Adapun rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfo pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Diskominfofik Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kota Banda Aceh

Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	16		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika		Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada		20.064.243.745	APBK	-		22.124.494.969	
2	16	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	100 %	7.905.346.615	APBK	-	100 %	8.695.881.277	
2	16	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	100 %	45.000.000	APBK	-	100 %	49.500.000	
2	16	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	5 dokumen	45.000.000	APBK	Adanya Kegiatan Forum OPD	5	49.500.000	
2	16	01	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	100 %	5.702.080.365	APBK	-	100 %	6.272.288.402	
2	16	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	12 bln	3.702.820.365	APBK	Penyesuaian dari BPKK	12	4.073.102.402	

2	16	01	2.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	12	bln	1.999.260.000	APBK	Penambahan Tenaga Non-PNS	12	bln	2.199.186.000
2	16	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	100	%	80.300.000	APBK		100	%	88.330.000
2	16	01	2.05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	146	stel	80.300.000	APBK	Jumlah ASN Bertambah	146	stel	88.330.000
2	16	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	100	%	127.189.150	APBK	-	100	%	139.908.065
2	16	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	6	jenis	8.384.000	APBK	Memenuhi Kebutuhan Kantor Baru	6	jenis	9.222.400
2	16	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	7	jenis	22.153.000	APBK	Memenuhi Kebutuhan Dokumen Kantor yang Meningkatkan	7	jenis	24.368.300
2	16	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	20	laporan	96.652.150	APBK	Pembatasan Perjalanan Dinas Luar Daerah	20	laporan	106.317.365
2	16	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	100	%	1.239.207.000	APBK	-	100	%	1.363.127.700
2	16	01	2.07	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	1	unit	250.000.000	APBK	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	1	unit	275.000.000

2	16	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	10	unit	989.207.000	APBK	Pengalihan Belanja Modal Bidang	10	unit	1.088.127.700
2	16	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	100	%	508.902.500	APBK	-	100	%	559.792.750
2	16	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	12	bln	451.364.000	APBK	Memenuhi Kebutuhan Kantor Baru	12	bln	496.500.400
2	16	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	12	bln	57.538.500	APBK	Memenuhi Kebutuhan Kantor Baru	12	bln	63.292.350
2	16	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	100	%	202.667.600	APBK		100	%	222.934.360
2	16	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	4	unit	109.392.100	APBK	Memenuhi Kebutuhan Kantor Baru	4	unit	120.331.310
2	16	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	58	unit	93.275.500	APBK	Memenuhi Kebutuhan Kantor Baru	58	unit	102.603.050
2	16	02			Program Informasi & Komunikasi Publik	Persentase Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada Masyarakat	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	100	%	1.720.397.150	APBK	-	100	%	1.892.436.865
2	16	02	2.01		Kegiatan Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Website OPD yang Aktif	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	80	%	1.720.397.150	APBK	-	100	%	1.892.436.865
2	16	02	2.01	02	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Aspirasi atau Pengaduan Warga yang Direspon	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	12	Aspirasi	116.162.000	APBK	Penambahan Tim Teknis	12	Aspirasi	127.778.200

2	16	02	2.01	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Rilis Berita, Informasi dan Liputan yang dipublikasi	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	600	Berita	218.891.500	APBK	Penambahan Tim Teknis	600	Berita	240.780.650
2	16	02	2.01	06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Direspon dan Diverifikasi	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	12	Permohonan	392.718.900	APBK	Penambahan Tim Teknis	12	Permohonan	431.990.790
2	16	02	2.01	07	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Media Massa dan Media Luar Ruang yang Digunakan Untuk Mendesiminasikan Informasi	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	5	Media	906.622.850	APBK	Penyisipan POKIR, Penambahan Item Sub Kegiatan	5	Media	997.285.135
2	16	02	2.01	08	Sub Kegiatan Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Internet Syariah di Fasilitas Publik Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	10	kali	20.264.900	APBK	Pembatasan Kegiatan Lapangan	10	kali	22.291.390
2	16	02	2.01	10	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SDM OPD yang diberikan Pelatihan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	45	Orang	16.768.000	APBK	Pembatasan Kegiatan Kerumunan	45	Orang	18.444.800
2	16	02	2.01	12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Pembinaan Kelompok Informasi Gampong yang Dilaksanakan	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	1	Kali	48.969.000	APBK	Penambahan peserta Lomba	1	Kali	53.865.900
2	16	03			Program Aplikasi Informatika	Persentase terpenuhinya layanan jaring komunikasi dan layanan serta data terintegrasi	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	100	%	10.438.499.980	APBK	-	100	%	11.536.176.827
2	16	03	2.01		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota	Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	55	%	4.703.963.280	APBK	-	100	%	5.174.359.608
2	16	03	2.01	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD yang Diberikan Layanan Jaringan Intra (WAN) Pemerintah	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	44	SKPD	4.703.963.280	APBK	Penyisipan Dana OTSUS	44	SKPD	5.174.359.608

2	16	03	2.02	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	55	%	5.734.536.700	APBK	-	100	%	6.361.817.219
2	16	03	2.02	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	47	Orang	254.047.750	APBK	Pembuatan Dokumen Proses Bisnis	47	Orang	279.452.525
2	16	03	2.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	1	Tahun	278.332.000	APBK	Persiapan Kantor baru	1	Tahun	306.165.200
2	16	03	2.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	1	Dokumen	80.057.000	APBK	Penambahan Tim Teknis	1	Dokumen	88.062.700
2	16	03	2.02	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	3	Aplikasi	293.956.600	APBK	Maksimalisasi Item dan Aplikasi	3	Aplikasi	323.352.260
2	16	03	2.02	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	2	Jenis	4.828.143.350	APBK	Penyisipan Dana OTSUS Pembangunan Gedung	2	Jenis	5.310.957.685
2	16	03	2.02	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	1	Laporan	-	APBK	-	1	Laporan	53.826.849
2	20			Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada			229.150.650	APBK	-			252.065.715
2	20	02		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	100	%	229.150.650	APBK	-	100	%	252.065.715
2	20	02	2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	25	%	229.150.650	APBK	-	100	%	252.065.715

2	20	02	2.01	02	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Pemda yang Memiliki Kapasitas Mutu Integrasi Statistik Daerah	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	68	Orang	132.704.150	APBK	Maksimalisasi Item dan Anggaran	68	Orang	145.974.565
2	20	02	2.01	04	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang diverifikasi/validasi, diupdate dan dianalisis open/public datasetnya	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	34	OPD	96.446.500	APBK	Maksimalisasi Item dan Anggaran	34	OPD	106.091.150
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada			300.321.500	APBK				330.353.650
2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	100	%	300.321.500	APBK	-	100	%	330.353.650
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota	Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	55	%	281.004.500	APBK	-	100	%	309.104.950
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Jangka Waktu Layanan Sistem Keamanan Jaringan yang Diadakan	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	1	Tahun	281.004.500	APBK	Penambahan Tim Teknis	1	Tahun	309.104.950
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota	Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	55	%	19.317.000	APBK	-	100	%	21.248.700
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota	Jumlah Surat Sandi yang Dikelola	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	200	Surat	19.317.000	APBK	Maksimalisasi Item dan Anggaran	200	Surat	21.248.700
TOTAL										20.593.715.895					22.706.914.334

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISKOMINFOTIK

Untuk mencapai tujuan strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh yakni tersedianya data dan informasi yang berkualitas dan terintegrasi di dalam Kota Banda Aceh diperlukan rangkaian strategi dan kebijakan dimana untuk mewujudkan strategi dan kebijakan tersebut dibutuhkan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan yang memadai.

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1) Program

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Diskominfo Kota Banda Aceh dan sebagai upaya di dalam mengantisipasi berbagai permasalahan di Bidang Komunikasi, Informasi dan Statistik, maka disusunlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Informasi & Komunikasi Publik;
3. Program Aplikasi Informatika;
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

2) Kegiatan

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintahan dengan memanfaatkan

sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan program yang telah ditetapkan bersama, maka perlu ditetapkan beberapa kegiatan untuk menunjang program-program yang telah ada.

Untuk merealisasikan program-program di atas, ditetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Kegiatan Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota;
10. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota;
11. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kota;
12. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota;
13. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota.

3) Sub Kegiatan

Sub Kegiatan merupakan bentuk penjabaran atau terjemahan lebih lanjut dari aktivitas atau layanan kegiatan di dalam pelaksanaan kewenangan daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk merealisasikan Kegiatan-kegiatan yang telah dijabarkan di atas, ditetapkan sub kegiatan-sub kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
3. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
4. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
5. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
6. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
8. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
9. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
10. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
11. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
12. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan;
13. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
14. Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik;
15. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik;
16. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
17. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media;
18. Sub Kegiatan Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan;
19. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik;
20. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas;

21. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
22. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota;
23. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;
24. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik;
25. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
26. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas;
27. Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi;
28. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral;
29. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;
30. Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota;

Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rencana Kerja, Pendanaan dan Kelompok Sasaran DISKOMINFOTIK Tahun 2022
Kota Banda Aceh

Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target		Pagu	Kelompok Sasaran
						Volume	Satuan		
1			2	3	4	5	6	7	8
2	16		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika		Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada			20.064.243.745	
2	16	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	100	%	7.905.346.615	
2	16	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	100	%	45.000.000	
2	16	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	5	dokumen	45.000.000	Pegawai Pada Diskominfotik
2	16	01	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	100	%	5.702.080.365	
2	16	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	12	bln	3.702.820.365	Pegawai Pada Diskominfotik
2	16	01	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perangkat Daerah yang disediakan	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	12	bln	1.999.260.000	Tenaga ADM / Teknis Perangkat Non PNS
2	16	01	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	100	%	80.300.000	

2	16	01	2.05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	146	stel	80.300.000	Pegawai Pada Diskominfotik
2	16	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	100	%	127.189.150	
2	16	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	6	jenis	8.384.000	Kantor Diskominfotik
2	16	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	7	jenis	22.153.000	Kantor Diskominfotik
2	16	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	20	laporan	96.652.150	Pegawai Pada Diskominfotik
2	16	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	100	%	1.239.207.000	
2	16	01	2.07	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	1	unit	250.000.000	Kendaraan Dinas Kantor Diskominfotik Banda Aceh
2	16	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	10	unit	989.207.000	Kantor Diskominfotik
2	16	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	100	%	508.902.500	
2	16	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	12	bln	451.364.000	Kantor Diskominfotik
2	16	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	12	bln	57.538.500	Pegawai Pada Diskominfotik

2	2	16	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	100	%	202.667.600	Kendaraan Dinas Kantor Diskominfotik Banda Aceh
2	2	16	01	2.09	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	4	unit	109.392.100	
2	2	16	01	2.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	58	unit	93.275.500	Kantor Diskominfotik
2	2	16	02		Program Informasi & Komunikasi Publik	Persentase Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada Masyarakat	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	100	%	1.720.397.150	
2	2	16	02	2.01	Kegiatan Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Website OPD yang Aktif	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	80	%	1.720.397.150	
2	2	16	02	2.01	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Aspirasi atau Pengaduan Warga yang Direspon	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	12	Aspirasi	116.162.000	Pengguna Informasi
2	2	16	02	2.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Rilis Berita, Informasi dan Liputan yang dipublikasi	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	600	Berita	218.891.500	Pengguna Informasi
2	2	16	02	2.01	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Direspon dan Diverifikasi	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	12	Permohonan	392.718.900	Pengguna Informasi
2	2	16	02	2.01	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Media Massa dan Media Luar Ruang yang Digunakan Untuk Mendesiminasikan Informasi	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	5	Media	906.622.850	Pengguna Informasi
2	2	16	02	2.01	Sub Kegiatan Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Internet Syaria di Fasilitas Publik Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	10	kali	20.264.900	Pengguna Informasi

2	2	16	02	2.01	10	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SDM OPD yang diberikan Pelatihan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	45	Orang	16.768.000	Wartawan Pemula
2	2	16	02	2.01	12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Pembinaan Kelompok Informasi Gampong yang Dilaksanakan	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	1	Kali	48.969.000	Kelompok Informasi Gampong
2	2	16	03			Program Aplikasi Informatika	Persentase terpenuhinya layanan jaring komunikasi dan layanan serta data terintegrasi	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	100	%	10.438.499.980	
2	2	16	03	2.01		<i>Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota</i>	<i>Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan</i>	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	55	%	4.703.963.280	
2	2	16	03	2.01	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD yang Diberikan Layanan Jaringan Intra (WAN) Pemerintah	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	44	SKPD	4.703.963.280	SKPD Kota Banda Aceh
2	2	16	03	2.02		<i>Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota</i>	<i>Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan</i>	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	55	%	5.734.536.700	
2	2	16	03	2.02	01	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota	Jumlah SDM Pemda yang Dilatih Untuk Pembuatan Dokumen Proses Bisnis SKPK	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	47	Orang	254.047.750	SKPD Kota Banda Aceh
2	2	16	03	2.02	03	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Jangka Waktu Pelayanan Operasional Pusat Data	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	1	Tahun	278.332.000	SKPD Kota Banda Aceh
2	2	16	03	2.02	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE Kota	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada		Dokumen	80.057.000	SKPD Kota Banda Aceh
2	2	16	03	2.02	07	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Khusus yang Dikembangkan	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	3	Aplikasi	293.956.600	SKPD Kota Banda Aceh

2	16	03	2.02	09	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Jenis Penguatan Command Center Kota yang Dilaksanakan	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	2	Jenis	4.828.143.350	SKPD Kota Banda Aceh
2	16	03	2.02	12	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Laporan Monev SPBE	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	1	Laporan	-	SKPD Kota Banda Aceh
2	20				Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada			229.150.650	
2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya data base statistik daerah	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	100	%	229.150.650	
2	20	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	25	%	229.150.650	
2	20	02	2.01	02	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Pemda yang Memiliki Kapasitas Mutu Integrasi Statistik Daerah	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	68	Orang	132.704.150	SKPD Kota Banda Aceh
2	20	02	2.01	04	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang diverifikasi/validasi, diupdate dan dianalisis open/public datasetnya	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	34	OPD	96.446.500	SKPD Kota Banda Aceh
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada			300.321.500	
2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	100	%	300.321.500	
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota	Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	55	%	281.004.500	

2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Jangka Waktu Layanan Sistem Keamanan Jaringan yang Diadakan	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	1	Tahun	281.004.500	SKPD Kota Banda Aceh
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota	<i>Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan</i>	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	55	%	19.317.000	
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota	Jumlah Surat Sandi yang Dikelola	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	200	Surat	19.317.000	SKPD Kota Banda Aceh
TOTAL										20.593.715.895	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun ini merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh pada Tahun 2022. Penyusunan Rencana Kerja Diskominfo ini lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dirangkum di dalam Renja untuk mewujudkan sasaran strategis dan juga untuk mencapai tujuan sehingga misi dan visi Diskominfo Kota Banda Aceh yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Renja Diskominfo menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah Kota Banda Aceh di dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Banda Aceh, Agustus 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**


FADHIL, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda /
NIP : 19680919 199011 1 001